

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

M Teguh Saefuddin¹, Salma Mudjahidah Az-zahra², Cucu Atikah³
^{1,2,3}Teknologi Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1m.teguh.saefuddin@gmail.com](mailto:m.teguh.saefuddin@gmail.com), [2salmazahra799@gmail.com](mailto:salmazahra799@gmail.com),
[3cucuatikah@untirta.ac.id](mailto:cucuatikah@untirta.ac.id)

ABSTRACT

Educational management is the application of management science to the scope of education and is part of applied sciences, especially in the field of education both at school and outside school. There are still many errors in understanding and conceptualizing policies. Some people use the term "wisdom," which is very different from "policy." In contrast to policy, wisdom is the knowledge that a person has. This research uses a qualitative method in the nature of library research which uses books, literature and other journal articles as research objects. Policy is often interpreted etymologically, namely polis which means city, policy regarding with regulatory ideas and is a formal pattern that is equally accepted by the government or an institution. The function of educational policy is very important in regulating and improving a country's education system. Through education policy, clear standards are set to ensure equal and relevant quality of education for all students. It is hoped that good education policies can improve everyone's abilities, encourage social and economic progress, and produce a more advanced and competitive society.

Keywords: Education Policy, Public Policy, Wisdom

ABSTRAK

Manajemen pendidikan merupakan aplikasi ilmu manajemen ke dalam lingkup pendidikan dan merupakan bagian dari applied sciences terutama pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Masih banyak kesalahan dalam pemahaman dan konsepsi kebijakan. Beberapa orang menggunakan istilah "kebijaksanaan", yang sangat berbeda dengan "kebijakan". Berbeda dengan kebijakan, kebijaksanaan adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku, literatur-literatur dan artikel-artikel jurnal lainnya sebagai objek penelitian. Kebijakan (policy) sering diartikan secara etimologi yaitu polis yang artinya kota (city), kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau suatu Lembaga Fungsi kebijakan pendidikan sangat penting dalam mengatur dan meningkatkan sistem pendidikan suatu negara. Melalui kebijakan pendidikan, standar-standar yang jelas ditetapkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata dan relevan bagi semua peserta didik. Kebijakan pendidikan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan setiap orang, mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, dan menghasilkan masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Publik, Kebijaksanaan

A. Pendahuluan

Kebijakan publik sering kali kita pahami sebagai keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, keuangan dan sumberdaya manusia. Ditinjau dari proses, kebijakan publik diartikan sebagai buah dari terciptanya sinergi kesepakatan bahkan antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem. Oleh karena itu, kebijakan merupakan instrumen untuk melakukan suatu tindakan dalam bidang tertentu seperti mengatur tentang fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. yang dianggap akan membawa dampak positif.

Kebijakan juga adalah aturan tertulis yang bersifat formal yang dibuat oleh organisasi atau kelompok dengan harapan atau tujuan menciptakan nilai-nilai berdasarkan kesepakatan atau norma yang berlaku dengan tujuan kemajuan bersama tanpa menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, diharapkan kebijakan dapat diterapkan dan diaplikasikan secara umum dan keseluruhan tetapi tetap mempertimbangkan aspek lokal.

Masih banyak kesalahan dalam pemahaman dan konsepsi kebijakan. Beberapa orang menggunakan istilah "kebijaksanaan", yang sangat berbeda dengan "kebijakan". Berbeda dengan kebijakan, kebijaksanaan adalah pengetahuan yang dimiliki seseorang.. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) yang menggunakan buku-buku, literatur-literatur dan artikel-artikel jurnal lainnya sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan yaitu dengan mengumpulkan data-data kepustakaan yang berkaitan tentang "kebijakan Pendidikan". Kemudian data tersebut dipilih, disajikan dan dianalisis serta dibuat ringkas dan

sistematis. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa analisis isi yang bertujuan untuk menggali pesan yang terkandung dalam data tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan (policy) sering diartikan secara etimologi yaitu polis yang artinya kota (city), kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima oleh pemerintah atau suatu Lembaga. Abidin menjelaskan kebijakan adalah “keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat.”

Pendidikan adalah sebuah kata yang menjadi acuan masyarakat untuk menyebut intelektualitas seseorang. Maka dengan semakin tinggi Pendidikan seseorang, maka akan dengan mudah mendapatkan suatu pekerjaan. Namun, kesuksesan seseorang juga harus dibarengi dengan skill dan kemauan tinggi. Sumber daya manusia yang berkualitas akan membuat suatu bangsa menjadi disegani oleh bangsa lainnya, dan lewat pendidikanlah semua dapat dicapai. Dirumuskan secara singkat bersahaja,

“pendidikan” bermakna bimbingan/pimpinan dalam pertumbuhan perkembangan hidup manusia (opvoeding is leiding bij's mensen groei). Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia merdeka lahir batin.

Hubungan antara kebijakan publik (kebijakan Pendidikan) dengan manajemen pendidikan akan selalu berkaitan tentang manajemen pendidikan secara makro. Secara prinsip, manajemen pendidikan adalah aplikasi ilmu manajemen ke dalam lingkup pendidikan dan hal tersebut adalah bagian dari applied sciences terutama pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh manajemen pendidikan sama dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep manajemen pada umumnya, maka dari itu fungsi-fungsi manajemen pendidikan juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan manajemen. pengaplikasikan manajemen di bidang pendidikan diarahkan pada usaha dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada prinsipnya

sama dengan yang diterapkan dalam lingkup manajemen.

b. Fungsi kebijakan Pendidikan

Fungsi kebijakan pendidikan sangat penting dalam mengatur dan meningkatkan sistem pendidikan suatu negara. Melalui kebijakan pendidikan, standar-standar yang jelas ditetapkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata dan relevan bagi semua peserta didik. Selain itu, kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk mendorong akses pendidikan yang adil dan inklusif, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan berperan dalam mengarahkan inovasi dalam metode pembelajaran dan kurikulum, sehingga sistem pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi tantangan sosial yang memengaruhi pendidikan, seperti kesenjangan pendidikan dan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menyediakan landasan yang kokoh untuk pembangunan sistem pendidikan yang inklusif,

berkualitas, dan berkelanjutan bagi masa depan generasi mendatang.

Faktor yang menentukan perubahan, perkembang, atau restrukturisasi organisasi adalah pelaksanaan kebijakan organisasi yang berhasil memperlihatkan efektivitasnya. Kebijakan organisasi esensialnya merupakan serangkaian Keputusan yang mencakup tujuan, prinsip, dan aturan-aturan yang diatur dalam sebuah format tertentu, menjadi panduan bagi pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta memperhitungkan interaksi dengan lingkungan eksternal.

Ketika membahas system Pendidikan nasional, penting untuk memperhatikan proses Panjang dalam pembuatan kebijakan public yang mencakup masalah Pendidikan. Tahapan-tahapan dalam proses ini, seperti pengamatan terhadap realitas sosial dan budaya, menjadi kunci bagi para pembuat kebijakan Pendidikan untuk menciptakan kebijakan yang tepat dan relevan.

c. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Untuk menjadi efektif, kebijakan pendidikan juga harus mempertimbangkan keadilan sosial. Sumber daya termasuk fasilitas yang

memadai, guru yang berkualitas tinggi, dan dana yang memadai. Sebuah kebijakan pendidikan dapat memberikan dengan mempertimbangkan ciri-ciri ini. Salah satu ciri khas kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan Pendidikan

Sebuah kebijakan Pendidikan harus mencantumkan tujuan yang spesifik yang relevan dengan konteks Pendidikan. Tujuan Pendidikan yang ditetapkan haruslah jelas dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang kontribusinya terhadap kemajuan dunia Pendidikan (Lazwardi, 2017).

2. Kepatuhan terhadap aspek legal dan formal

Sebelum kebijakan Pendidikan diberlakukan, harus dipastikan bahwa semua persyaratan legal dan formal telah terpenuhi agar kebijakan tersebut memiliki keabsahan hukum dan diakui secara resmi. Oleh karena itu, penting bagi kebijakan tersebut untuk disahkan melalui proses yang sesuai dengan hirarkikonstitusi yang berlaku, sehingga mendapatkan legitimasi yang kuat (Anwar, 2017).

3. Konsep operasional yang jelas

Kebijakan Pendidikan haruslah menyediakan panduan operasional

yang konkret. Hal ini diperlukan agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktiknya, serta memungkinkan pengukuran yang akurat terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Solichin, 2015).

4. Pembuatan oleh pihak berwenang

Kebijakan Pendidikan harus dirumuskan dan dibuat oleh para ahli yang memiliki wewenang dan pengetahuan yang memadai dalam proses pembuatan kebijakan. Langkah ini diambil untuk menghindari kemungkinan timbulnya masalah baru yang mungkin muncul akibat kebijakan yang tidak terarah (Heriawan, 2018).

5. Keterbukaan terhadap Evaluasi

Kebijakan Pendidikan harus dapat dievaluasi secara berkala. Evaluasi ini penting karena dapat mengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Jika sebuah kebijakan terbukti berhasil, maka dapat dikembangkan lebih lanjut. Namun, jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka perbaikan harus dilakukan (Lukitasari et al., 2017).

6. Sistematika yang Komprehensif

Kebijakan Pendidikan harus disusun dengan sistematika yang mencakup seluruh aspek yang

relevan. Sistematis tersebut harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan, serta harus bersifat tidak pragmatis dan tidak diskriminatif dalam implementasinya. Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

D. Kesimpulan

Kebijakan publik adalah alat penting untuk menciptakan dan menggerakkan perubahan sosial. Faktor-faktor seperti evaluasi yang teratur, penetapan tujuan yang jelas, dan transparansi menjadi landasan utama dalam proses pembuatannya. Demikian pula, analisis kebijakan publik sangat penting untuk mengevaluasi pengaruh dan implikasi dari kebijakan yang diusulkan atau diterapkan. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini, para pembuat kebijakan dapat membuat dan menerapkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berhasil mencapai tujuan. Oleh karena itu, memahami bagaimana kebijakan publik dibuat dan proses analisisnya sangat penting untuk

keberhasilan dan keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang.

Fungsi kebijakan pendidikan sangat penting dalam mengatur dan meningkatkan sistem pendidikan suatu negara. Melalui kebijakan pendidikan, standar-standar yang jelas ditetapkan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata dan relevan bagi semua peserta didik. Selain itu, kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk mendorong akses pendidikan yang adil dan inklusif, sehingga semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas.

Selanjutnya, kebijakan pendidikan berperan dalam mengarahkan inovasi dalam metode pembelajaran dan kurikulum, sehingga sistem pendidikan dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Selain itu, kebijakan pendidikan juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatasi tantangan sosial yang memengaruhi pendidikan, seperti kesenjangan pendidikan dan ketidaksetaraan gender. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menyediakan landasan yang kokoh untuk pembangunan sistem pendidikan yang inklusif,

berkualitas, dan berkelanjutan bagi masa depan generasi mendatang

Untuk menghindari kesalahan pemahaman tentang aturan atau peraturan yang berlaku terkait kebijakan yang dibuat, yang dapat menyebabkan kerugian fisik atau materil, pendidikan harus memperhatikan poin penting tentang kebijakan publik dan analisisnya. Serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk mengatur, mengembangkan, dan meningkatkan sistem pendidikan negara atau wilayah disebut kebijakan pendidikan. Berbagai aspek kebijakan pendidikan termasuk kurikulum, teknik pengajaran, penilaian, pendanaan pendidikan, pengembangan profesional guru, kesetaraan pendidikan, dan akses pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan setiap orang, mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, dan menghasilkan masyarakat yang lebih maju dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Bakry, Aminuddin, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN SEBAGAI KEBIJAKAN PUBLIK Aminuddin', *MEDTEK*, 2.1 (2010)

Farkhan, Aulia, Anisa Rahmah, Umar Alwatasi, and Farid Setiawan, 'Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16.5 (2022), 1921
<<https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1354>>

Giantara, Febri, and Reni Amiliya, 'Urgensi Kebijakan Pendidikan Islam Sebagai Bagian Dari Kebijakan Publik (Analisis Teoretis)', *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 11.2 (2021), 86–96

Hafids, Jawade, 'Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Kertha Wicaksana*, 12.1 (2018), 22
<<https://doi.org/10.22225/kw.12.1.420.22-37>>

Hastuti, Tri Puji, and Soehartono Soehartono, 'Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik', *Jurnal Jurisprudence*, 8.1 (2018), 34–41
<<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v8i1.6293>>

Machali, Imam, 'Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Dalam Kajian Manajemen Dan Kebijakan Pendidikan Islam', *El-Tarbawi*, 8.1 (2015), 32–53
<<https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art3>>

Mada Sutapa, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Mada Sutapa *)', 1–9

Rozak, Abdul, 'KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA Abdul', 3.25 (2021), 6

Safitri, Ulandari, Adek Nuarizal, and Nurhizrah Gistituati, 'Urgensi Analisis Kebijakan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6.1 (2021), 72
<<https://doi.org/10.29210/3003818000>>

Tawa, Angelika Bule, 'Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar', *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 4.2 (2019), 107–17
<<https://doi.org/10.53544/sapa.v4i2.82>>

Yunitasari, Dukha, Ida Bagus Putu Arnyana, and Nyoman Dantes, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Dasar (Definisi, Aktor Pelaksana, Arena/Konteks, Jenis, Dan Langkah Kebijakan Pendidikan Dasar)', *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9.3 (2023), 1506
<<https://doi.org/10.29210/020232886>>